## RINGKASAN

Rossy Octafiany. A, 2009, **Peran Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Kelautan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur),** Dr. Abdul Hakim, M. Si, Drs. Trilaksono Nugruho, M. Si, 113 + xiii

Penelitian ini dilakukan atas dasar maraknya pembangunan, khususnya di bidang pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan daerahnya untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam era otonomi daerah. Dalam melakukan pembangunan bidang pariwisata ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar terjadi suatu pembangunan yang tentunya berwawasan lingkungan.

Bagaimana bentuk pembangunan pariwisata dan pelestariannya, peran dari pemerintah, swasta dan masyarakat, dan apa yang menjadi kendala serta faktor pendukung bagi pemerintah, sawasta dan masyarakat dalam melakukan pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

Hasil dari penelitian disajikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskritif, yaitu menggambarkan dan memaparkan apa yang sedang terjadi saat ini pada tempat penelitian. Dalam penelitiannya penulis menerangkan pembangunan pariwisata kelautan dan pelestariannya di Kabupaten Berau. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Berau yang bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pembangunan yang dilakukan oleh masing- masing *stakeholder* telah sesuai dengan peran yang dipegang masing- masing seperti pemerintah yang menciptakan suatu kebijakan, swasta yang menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan masyarakat yang merupakan tokoh untuk menjalankan pembangunan didaerah tempat tinggal mereka. Kerja sama antar pihak tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan terjadinya suatu pembangunan yang sesuai dengan cita- cita pembangunan yang berwawasan lingkungan serta untuk dapat memajukan daerah pariwisata Kabupaten Berau.

Kendala dan faktor pendukung yang dihadapi oleh ketiga *stakeholder* tersebut merupakan suatu masukan kembali bagi pemerintah sebagai bahan analisis pembuatan kebijakan baru.